

## BAB V

### BERBAGAI KEGIATAN BELAJAR DI PESANTREN DALAM VISI PENGAJARAN IPS

#### 1. Hakekat IPS

##### a. *Pengertian IPS*

Beberapa bahan acuan, antara lain yang ditulis oleh Achmad Sanusi (1971), dan Nursid Sumaatmadja (1980), menyatakan bahwa apa yang disebut studi sosial (*social studies*) di Amerika Serikat, adalah sama dengan IPS di Indonesia. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa studi sosial atau IPS itu bisa bertaraf akademik-universiter dan bisa juga merupakan bahan-bahan pelajaran untuk jenjang pendidikan sekolah, baik pendidikan dasar maupun lanjutan. Fokus kajian IPS adalah gejala dan masalah sosial; sedangkan metode dan konsep-konsep yang digunakan untuk mengenal, memahami, menganalisis, menafsirkan, dan memilih alternatif penyelesaiannya diadaptasi atau ditarik dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan bahkan bila diperlukan dari ilmu-ilmu lainnya. Bahan bacaan lainnya, yang ditulis oleh Robert Barr, James L. Barth, dan S. Samuel Shermis (1978), menampilkan suatu definisi studi sosial sebagai berikut.

*Social studies is an integration of social sciences and humanities for the purpose of instruction in citizenship education.*

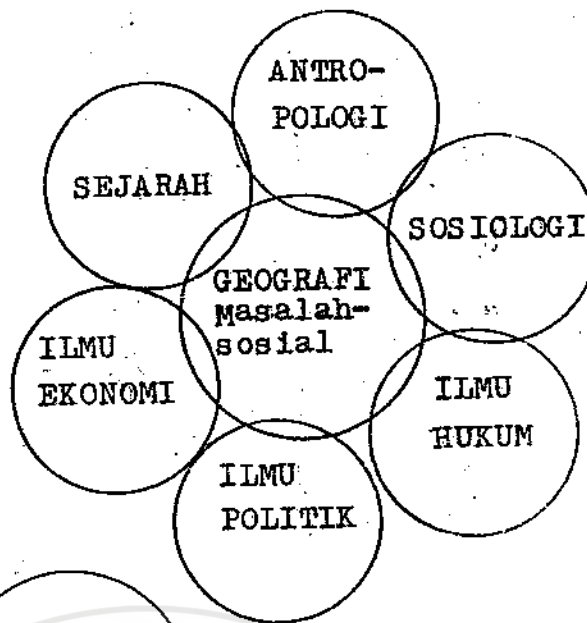
Karakteristik studi sosial atau IPS antara lain (1) *citizenship transmission*, esensi dari ciri ini adalah upaya memperkenalkan kemanfaatan ilmu, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan bagi kelangsungan kebudayaan; (2) bahan pengajaran IPS diadaptasi atau ditarik dari ilmu-ilmu sosial, yang berarti guru-guru mesti mengakrabkan siswanya dengan metode-metode penelitian, pencarian berbagai alternatif pemecahan masalah, dan mengenal pandangan-pandangan mengenai

perkembangan dunia yang berasal dari para ahli ilmu sosial; (3) *reflective inquiry*, salah satu kemampuan penting yang mesti dimiliki seorang warga (masyarakat, negara) adalah kemampuan menentukan pilihan, siswa membutuhkan kemampuan mengidentifikasi isu-isu dan masalah-masalah serta membuat keputusan baik yang berkenaan dengan gagasan maupun kebijakan.

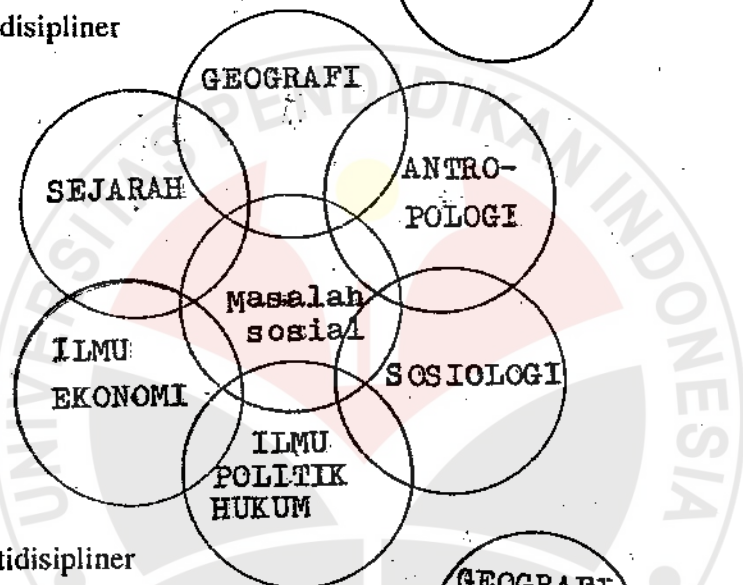
Seorang warga (masyarakat, negara) seyogianya seseorang yang loyal pada kebijakan-kebijakan para praktisi, memiliki keyakinan mantap pada nilai-nilai yang berlaku, serta harmoni dengan norma-norma yang menjadi kekhasan lingkungan setempat. Kemampuan berpartisipasi mesti menjadi tuntutan bagi seorang warga masyarakat; ia menjadi pewaris norma-norma yang mesti menginternalisasikannya.

Uraian tadi menunjukkan IPS bukan merupakan suatu disiplin ilmu, tetapi lebih menunjukkan suatu pendekatan untuk mengkaji gejala, isu-isu, dan masalah-masalah sosial. IPS dalam mengkaji masalah sosial tersebut berkepentingan dengan pendekatan-pendekatan yang antara lain, (1) pendekatan fungsional (*functional approach*); pengkajian suatu masalah sosial dengan menggunakan konsep-konsep yang didominasi oleh salah satu disiplin ilmu sosial, misalnya geografi, sedangkan konsep-konsep dari disiplin ilmu lainnya hanya berperan sebagai penunjang. (2) Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*); pengkajian suatu masalah sosial yang tidak dapat didominasi oleh konsep-konsep dari salah satu disiplin ilmu sosial, tetapi membutuhkan konsep-konsep dari sejumlah ilmu sosial secara berimbang. (3) Pendekatan multidisipliner (*multidisciplinary approach*); pengkajian masalah sosial yang selain membutuhkan konsep-konsep dari sejumlah ilmu sosial, tetapi bahkan dari ilmu-ilmu lainnya. Pada halaman berikut ini disajikan tiga buah bagan yang memvisualisasikan ketiga macam pendekatan tadi.

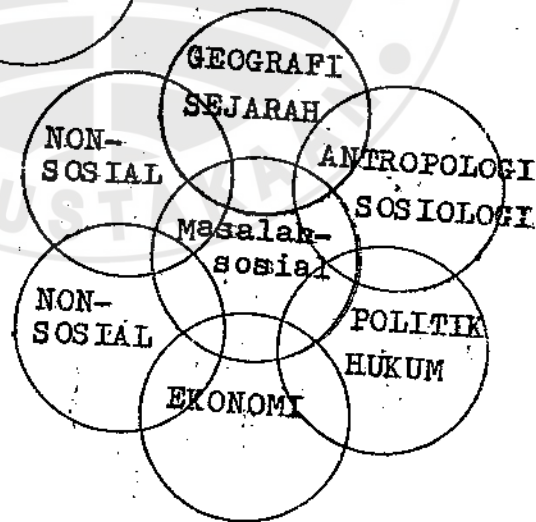
Pendekatan Fungsional



Pendekatan Interdisipliner



Pendekatan Multidisipliner



Bagan: Tiga Pendekatan Studi Sosial (IPS)

Apa yang dimaksud dengan masalah sosial itu? Definisi dan bentuk-bentuk masalah sosial sangat beragam, tergantung pada latar belakang profesi dari sipembuat definisi tersebut. C. Wright Mills (Ron'E. Roberts, 1978) misalnya, apa yang disebut masalah sosial (*social problems*) lebih berkepentingan dengan apa yang disebut *social pathology*. Pathologi, tentu saja berhubungan dengan istilah medik, yang berkepentingan dengan identifikasi dan perlakuan (*treatment*) terhadap suatu penyakit. Pasien atau pesakitan dalam hal ini, dilihat sebagai masyarakat luas dan individu-individu yang menyimpang (mereka yang tidak mengikuti norma-norma kelompoknya), dalam hal ini adalah penyakit. Arnold Rose (Ron'E. Roberts, 1978) menunjukkan masalah sosial sebagai, *conditions which affect sizeable proportions of the population which are out of harmony with the values of a significant segment of the population, and which people feel can be improved or eliminated*. Masalah sosial adalah kondisi-kondisi yang menimbulkan ketidakharmonisan dari sebagian penduduk dengan nilai-nilai yang signifikan dalam kelompoknya, dan dirasakan oleh orang-orang bahwa penyimpangan tersebut dapat diperbaiki atau dikurangi. Herbert Blumer dalam artikelnya (1971), yang dikutip oleh Ron'E. Robert (1978) merumuskan tentang masalah sosial sebagai berikut, (1) *social problems are a process, not a state of being; they evolve through definition, compromise, propaganda, and collective action*; (2) *social problems are political problems because it is in the realm of politics that the power to define and solve problems remains*.

Pendekatan kaum humanis berkenaan dengan masalah sosial didasarkan pada dua hal, yaitu (1) sesuatu yang berkaitan dengan etika, mereka mengatakan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama, oleh karena itu, sikap membeda-bedakan derajat manusia berdasarkan kelas, jenis kelamin, status, agama, dan kekayaan adalah anti kemanusiaan; (2) humanisme meyakini bahwa di dalam diri manusia sarat dengan

berbagai potensi yang kuat, atau human possibilities. Selain kedua dasar tadi, ada empat rumusan yang berkenaan dengan studi sosial atau IPS, yaitu sebagai berikut.

(1) Suatu masalah sosial ada bila penataan kelembagaan cenderung menjadi sumber ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Fakta tampak sekali, bahwa lembaga-lembaga dengan akses teknologinya, kini memiliki kemampuan merusak alam dan kelangsungan kehidupan mahluk manusia. Melalui berbagai peralatan teknisnya, berbagai kelembagaan mengeksploitasi alam dan mendistribusikan kekayaan tersebut dengan cara yang salah sehingga menyebabkan kelaparan dan penyakit di banyak tempat dan kelompok manusianya. Hal ini menuntut pengkajian masalah sosial yang mesti dimulai dengan serius. (2) Suatu masalah sosial mungkin bisa dikatakan ada bila penataan kelembagaan meningkatkan kekuasaan atau dominasinya di tengah-tengah kebodohan atau keterbelakangan. (3) Suatu masalah sosial akan timbul bila penataan kelembagaan membatasi produktivitas sosial bagi individu-individunya. Orang selain mesti menghargai konsepnya sendiri, diharapkan juga siap menerima konsepsi dari pihak-pihak lain sehingga mampu memprediksi apa yang diperbuat oleh pihak atau oleh kelompok lain. Sementara itu, ada sejumlah orang dari generasi tua dalam masyarakat yang telah kehilangan gairah hidup karena tiba-tiba mereka berhenti bekerja atau pensiun. Hal ini berarti, mereka tidak produktif lagi. Kehormatan atau harga diri (self-esteem) mereka sering terancam, sehingga mereka menganggap dirinya tidak berharga atau tidak berarti lagi. Perasaan kehilangan harga diri atau ketidakberartian diri semacam ini adalah inti dari hampir semua masalah sosial. Hubungan langsung dengan gejala ini adalah masalah pengangguran. Untuk mengatasi masalah sosial semacam ini tidak sesederhana dengan sekedar meningkatkan produktivitas yang berkaitan dengan item-item produksi konsumtif, tetapi mesti berkaitan dengan "produksi" ilmu pengetahuan, seni sastra, dan berbagai bentuk



pelayanan bagi pemenuhan seluruh dimensi kemanusiaan. (4) Suatu masalah sosial akan terjadi bila penataan kelembagaan cenderung memisah-misahkan atau menceraiberaikan pribadi orang-orang dari aspek-aspek kemanusiaannya yang esensial. Sementara orang mungkin saja tidak setuju dengan ide yang merupakan esensi yang dimiliki oleh semua makhluk manusia. Sementara orang mungkin saja tidak setuju dengan ide yang merupakan *total-person*. Ada juga yang menerima ide bahwa manusia ada berarti mereka berbuat sesuatu; dan, setiap individu menampilkan dirinya sebagai perbuatan dalam bentuk yang totalitas, artinya bahwa akal pikirannya, fisiknya dan emosi-emosinya serempak bekerja secara terpadu. Sehubungan dengan konsep-konsep tadi, ada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah ada suatu penataan kelembagaan yang memaksa orang untuk berbuat tanpa melibatkan pikirannya dan hanya melibatkan fisiknya saja? Apakah ada suatu penataan kelembagaan yang mengharapkan orang untuk menghilangkan emosinya? Banyak birokrasi yang cenderung melakukan hal-hal tersebut. Bagaimana cara mereka bekerja agar orang memisahkan akal pikirannya dari emosinya, atau memisahkan ilmu dan bisnis dari etika-etikanya? Banyak posisi dalam struktur birokratik yang menuntut pemisahan antara etika-etika privasi dari etika-etika publik atau bisnis.

Mills dan Gerth (Ron'E . Robert, 1978) menyatakan bahwa setiap orang akan berbeda-beda dalam perkembangan *vocabularies of motivation*-nya. Hal ini memberikan petunjuk bahwa sejumlah besar organisasi membutuhkan "pakaian" yang mampu membuatnya berwajah banyak, yang kosokbalinya dari keadaan seperti ini adalah keterasingan (*alienation*). Mengapa kehidupan-kehidupan dalam dunia kerja begitu terpisah dari kehidupan-kehidupan pribadi (*prevasi*); atau, mengapa begitu sulitnya menajamkan perasaan secara mantap (*stabil*) berkenaan dengan identitas dalam masyarakat yang terorganisasi secara birokratik? Memang tidak dikatakan

bahwa birokrasi-birokrasi itu tanpa nilai kemanusiaan; namun, banyak masalah sosial yang muncul dari anasir-anasir birokratik, baik vertikal (status dan konflik-konfliknya), maupun horizontal (di mana spesialisasi membuat sulit berkomunikasi dengan sesama). Ilmu pengetahuan, yang diperoleh dari universitas, diharapkan dapat menyiapkan seseorang untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, pendidikan yang lebih tinggi sering meningkatkan penggunaan bahasa-bahasa teknik yang asing yang membuat orang-orang awam sulit berkomunikasi dengan orang-orang di luar bidang keahliannya.

John U. Michaelis (1985), lebih banyak lagi menampilkan hakekat IPS, ia mengatakan bahwa setiap definisi studi sosial atau IPS itu merefleksikan suatu orientasi yang mengarah pada pendekatan tentang bagaimana mengembangkan warga (masyarakat, negara) yang baik. Sementara definisi berorientasi pada bahan atau konten (subject-matter); yang lain berorientasi pada kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk merespons kondisi, perubahan dan masalah sosial, definisi ini berfokus pada masyarakat (a society-centered orientation). Ada juga definisi yang menampakkan orientasinya pada optimasi pengembangan individu, artinya berfokus pada peserta didik (a student-centered orientation). Definisi-definisi berikut ini memberikan gambaran berkenaan dengan orientasi-orientasi tadi.

IPS sebagai *pewarisan nilai-nilai*, pewarisan ini dimaksudkan untuk mengantarkan seseorang untuk menjadi warga yang baik bagi masyarakatnya. IPS dalam hal ini, berkehendak meneruskan aspek-aspek warisan kesejarahan dan kebudayaan masyarakatnya. Dengan pewarisan nilai-nilai kesejarahan dan kebudayaan tadi diharapkan tumbuh dalam diri seseorang suatu kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat atau lingkungannya. Ia siap dan sanggup memelihara dan mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungannya sehingga memiliki

kebermaknaan dan kemanfaatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, ia telah melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan IPS itu sendiri, yaitu fungsi pemeliharaan pola-pola yang ada dalam masyarakatnya (*pattern-maintenance*), dan fungsi pencapaian tujuan bersama. (*goal attainment*).

IPS sebagai *pendidikan ilmu sosial*, berasal dari paham realisme dan positivisme, yang meyakini bahwa isi dan metode IPS diadaptasi atau ditarik dari ilmu-ilmu sosial. IPS dalam hal ini, menghendaki warga yang baik, yang dapat dikembangkan melalui pengenalan dan pemahaman konsep-konsep dasar serta mampu menggunakan pendekatan-pendekatan yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial. Pemahaman ini kemudian diaktualisasikan dalam usaha menyelesaikan berbagai isu dan masalah sosial yang berkembang di lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian, warga yang bersangkutan telah memanfaatkan fungsi pendidikan IPS, yaitu kesiapan dan kesanggupan menangani gejolak-gejolak sosial (*tension-management*).

IPS sebagai proses *berpikir reflektif*, berasal dari rezim pragmatis, yang meyakini bahwa fokus tujuan IPS adalah mengembangkan kemampuan berpikir dan membuat keputusan (*thinking and decision-making ability*). Rezim ini yakin bahwa warga yang baik adalah ia yang mampu menggunakan model-model dan proses-proses berpikir, yang selanjutnya digunakan untuk membuat keputusan dalam memilih alternatif penyelesaian isu dan masalah sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakatnya. Rezim inipun akhirnya berkehendak mengembangkan warga yang mampu membuat keputusan untuk menangani berbagai gejolak masyarakatnya (*tension management*).

IPS sebagai sistem *gagasan dan tindakan* yang kritis yang berkenaan dengan kemasyarakatan. Pendapat ini berasal dari paham rekonstruksi yang meyakini bahwa fokus tujuan IPS mesti mengembangkan ilmu pengetahuan (*knowledge*) dan



keterampilan (skills) yang efektif untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat. Paham ini berpendapat bahwa warga yang baik itu adalah ia yang senantiasa menaruh kepedulian terhadap isu dan masalah yang dihadapi masyarakatnya. Ia juga mampu membuat analisis yang kritis serta sanggup mengambil tindakan yang tepat.

IPS sebagai upaya *mengembangkan kepribadian* setiap individu, berasal dari paham progresivisme dan ekstensialisme. Paham ini meyakini bahwa program pengajaran IPS mesti berfokus pada peserta didik, yang seluruh potensinya harus berkembang seoptimal mungkin. Aspek-aspek dari potensi tersebut antara lain (1) aspek sosial, (2) aspek emosional, (3) aspek intelektual, (4) aspek fisik. Kemampuan membimbing dan memahami diri sendiri adalah hal yang esensial dalam mengembangkan warga yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. John U. Michaelis (1978) sependapat dengan rezim progresivisme dan ekstensialisme tadi, malahan ia menyebutkan bahwa warga yang bertanggung jawab itu merupakan fokus dari tujuan atau sasaran pengajaran IPS. Sedangkan aspek-aspek yang mesti dikembangkan agar tujuan tersebut tercapai adalah, (1) ilmu pengetahuan (knowledge), (2) proses berpikir (thinking process), (3) keterampilan (skills), (4) sikap-sikap dan nilai-nilai (attitudes and values) Fokus kajian bertumpu pada interaksi manusia baik dengan lingkungan sosial maupun dengan lingkungan fisikalnya. Kedua lingkungan tersebut meliputi berbagai unsur, yaitu unsur-unsur hidup dan tak hidup. Unsur-unsur hidup meliputi manusia dan unsur-unsur hayati lainnya; sedangkan unsur-unsur tak hidup meliputi bentuk-bentuk alami dan bentuk-bentuk hasil rekayasa manusia itu sendiri.

### b. Tujuan Pengajaran IPS

Hasil yang diharapkan dari sistem instruksional dalam jangka waktu yang relatif panjang, disebut *goals*; sedangkan hasil yang spesifik dan segera bisa diukur dari suatu sistem instruksional, disebut *objectives*. Jadi, tujuan sistem instruksional itu bisa diklasifikasikan menjadi *goals* dan *objectives*. Kedua tujuan ini berkepentingan langsung dengan tugas-tugas, kepedulian-kepedulian, dan harapan-harapan masyarakat.

IPS berkontribusi juga pada tujuan pendidikan secara keseluruhan; hal ini bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain (1) *self-realization*, siswa memperoleh segi ini lewat pengenalan dan pemahaman pada aspek-aspek ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai; (2) *human-relationship*, siswa memperoleh kemampuan ini melalui studi misalnya tentang kenyataan adanya kemajemukan etnik dan kebudayaan, pengembangan dan penguasaan berbagai keterampilan pribadi, dan kemampuan menganalisis masalah yang tengah dihadapi oleh kelompoknya; (3) *civic-responsibility*, siswa memperoleh nilai ini melalui studi misalnya berbagai aktivitas mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tetangga, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas; kemudian lewat studi yang berkenaan dengan konsep-konsep dan gagasan-gagasan yang menjadi program pemerintah, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga (masyarakat, negara); tidak ketinggalan juga lewat pengembangan proses berpikir dan kemampuan menilai. Semua kemampuan tadi diharapkan membantu siswa untuk siap dan sanggup beradaptasi, berintegrasi, dan berpartisipasi dalam menganalisis, membuat keputusan dan menyelesaikan isu dan masalah sosial yang tengah dihadapi oleh lingkungannya; (4) *economic-competence*, kemampuan ini diperoleh siswa lewat pemahaman konsep eksplorasi misalnya, kemudian pengembangan sikap-sikap dan keterampilan-keterampilan yang erat

hubungannya dengan dunia kerja dan karier, dan akhirnya kesiapan serta kesanggupan memanfaatkan dan memberikan kebermaknaan pada berbagai sumber dan peluang yang potensial di lingkungannya; (5) *thinking-ability*, mempertajam kemampuan berpikir yang bisa diperoleh siswa lewat berbagai kegiatan belajar, terutama yang melibatkan siswa untuk berpikir kreatif, kritis, serta kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kemampuan membuat keputusan; (6) *learn how to learn*, tidak saja belajar memahami konten dari program-program pengajaran, tetapi juga siswa perlu belajar bagaimana belajar, yang diaktualisasikan dalam membaca, belajar, dan kegiatan lain yang bisa mengembangkan keterampilan, belajar bebas dengan melakukan pembimbingan dan penilaian sendiri (*self-direction and self-evaluation*), kemudian kegiatan yang berkontribusi pada pengembangan kemampuan menggunakan model-model yang telah ditemukannya.

Rumusan suatu tujuan berfungsi juga untuk mengarahkan upaya membuat perencanaan, pengembangan, dan penilaian program-program pengajaran IPS. Ada yang membagi tujuan menjadi dua kategori, yaitu kognitif dan afektif. Ada juga yang membaginya menjadi tiga kategori, yaitu ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap serta nilai-nilai. Bahkan ada pula yang membagi tujuan itu menjadi empat kategori, yaitu ilmu pengetahuan, proses berpikir, keterampilan, sikap dan nilai serta pola-pola tindakan.

*Kategori ilmu pengetahuan*; khusus bagi warga dari masyarakat yang majemuk, kategori ini mesti diprioritaskan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan informasi, konsep, pemahaman, gagasan, dan generalisasi yang berhubungan dengan (1) bagaimana orang memperoleh kebutuhan pokok dan kebebasan di lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat, dan bangsa; (2) bagaimana hubungan antar wilayah, masyarakat dan kebudayaan, apa saja yang menjadi kepentingan bersama dan apa latar

belakang sehingga terjadi keragaman etnik tersebut; (3) tentang isyu dan masalah yang berkaitan dengan kepedulian sosial, lingkungan dan energi, emansipasi wanita dan kelompok etnik; (4) tentang fungsi-fungsi sosial misalnya transportasi, komunikasi, produksi, distribusi, konsumsi, konservasi, kelembagaan (pemerintah, pendidikan, dan keagamaan), rekreasi dan ekspresi artistik.

*Kategori proses berpikir*; ditunjukkan oleh proses kognitif atau proses dan kemampuan intelektual. Tekanannya pada pengembangan kemampuan menggunakan model-model berpikir kritis dan kreatif, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, proses berpikir spesifik. Sebagai contoh (1) mengidentifikasi, mengevaluasi, mengkritik, mengklasifikasi, dan menginterpretasi acuan-acuan (standars) serta membuat keputusan; (2) memecahkan masalah yang dimulai dari mendefinisikan masalah, menganalisis data untuk menyusun hipotesis-hipotesis, atau kemungkinan-kemungkinan pemecahan, pengumpulan dan interpretasi bukti-bukti baru untuk menguji alternatif-alternatif pemecahan dan membuat keputusan atau kesimpulan.

*Kategori keterampilan*; tekanannya pada keterampilan membaca, belajar dan berbahasa. Dalam hal ini, pembendaharaan kata, konsep-konsep dan gaya presensi (penampilan, pengekspresian) serta materi-materi IPS akan menjadi tantangan bagi siswa. Keterampilan berpartisipasi dimaksudkan agar siswa siap beradaptasi dan berintegrasi dengan kelompoknya, mulai dari kelompok kecil sampai dengan kelompok yang lebih luas. Keterampilan yang termasuk materi program pengajaran IPS misalnya keterampilan yang ada hubungannya dengan peta atau globe; yaitu, keterampilan membaca atau menginterpretasi, dan (sesuai dengan tingkatannya) keterampilan membuat peta dan model-model.

Tujuan dari keterampilan-keterampilan tadi antara lain (1) dengan keterampilan membaca diharapkan siswa mampu menemukan ide-ide pokok, meningkatkan impresi-

impresi sensori, dan memprediksi hasil-hasil dari suatu aktivitas; kemampuan menemukan, merevisi, dan mengorganisasikan informasi yang ditemukan dalam buku, referensi, perpustakaan, dan sumber-sumber belajar lainnya; (3) dengan keterampilan berpartisipasi dalam kelompok diharapkan siswa mampu berkontribusi baik dalam bentuk materi maupun gagasan, terbiasa menaruh respek terhadap sesama, siap untuk bergiat dalam suatu kepanitiaan atau organisasi, patuh dalam melaksanakan peran, dalam kesempatan-kesempatan tertentu ia mesti memiliki otoritas, siap untuk berperan sebagai pemimpin atau yang dipimpin, mampu membantu, memperkuat dan melaksanakan hasil-hasil kesepakatan kelompoknya.

*Kategori sikap, nilai dan pola tindakan;* kategori ini menekankan pada pembentukan ide-ide dan sikap-sikap demokratis, yang esensial dan efektif bagi warga masyarakat yang majemuk. Membangun sikap-sikap positif terhadap sesama, mengapresiasi kontribusi dan pandangan hidup dari generasi-generasi sebelumnya yang sangat berarti bagi generasi masa kini. kemampuan untuk menyelesaikan dan menilai isu-isu yang berkembang dalam masyarakatnya.

Tujuan kunci dari kategori sikap, nilai, dan pola tindakan ini adalah, (1) mengembangkan sikap positif dan apresiatif terhadap adanya fakta keragaman individu, kelompok, dan kebudayaannya baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan yang lebih luas lagi. Hal ini bisa diperoleh antara lain dari unit-unit pengajaran yang berkenaan dengan multikultural. (2) Mengembangkan apresiasi terhadap adanya fakta keragaman dan kesatuan; sikap semacam ini mesti dikembangkan lewat pemahaman nilai-nilai demokrasi, kerja sama, dan loyalitas terhadap nilai-nilai yang ada dalam pandangan hidup masyarakat (way of life). (3) Mengembangkan apresiasi terhadap nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat dan pola-pola perilaku demokratis, misalnya derajat kemanusiaan, hak individu, kebebasan,



kesamaan, keadilan, dan kepentingan bersama. Di samping semua ini, siswa diharapkan juga untuk menghargai serta loyal terhadap nilai-nilai kebebasan beragama, rasa tanggung jawab, keterbukaan, kreativitas, serta nilai-nilai kooperatif.

### c. Kurikulum IPS

Struktur konseptual IPS meliputi isi yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial dan sumber-sumber lainnya; kemudian, peristiwa-peristiwa kontemporer dan pengalaman siswa itu sendiri. Pengajarannya distruktur sebagai berikut (1) peristilahan, kata-kata, atau pembendaharaan kata, (2) ide-ide dasar atau generalisasi, (3) konsep-konsep dan kelompok konsep, dan (4) tema-tema atau topik-topik. Berikut ini sebagai contoh dari elemen-elemen ilmu-ilmu sosial dan bidang-bidang khusus lainnya.

*Pembendaharaan kata*; kata-kata seperti mobil, perang saudara, pahlawan, berani, transportasi, komunikasi, dan istilah-istilah lain dari peristiwa dan proses-proses lainnya. Kata-kata atau istilah-istilah dapat digunakan dengan penuh makna manakala siswa memahami konsep yang ditampilkannya.

*Konsep-konsep*; Istilah-istilah seperti keluarga, urban, kelompok etnik, masyarakat, dan sejenisnya. Sifat-sifat dari istilah-istilah ini adalah abstrak, yang diaplikasikan pada kategori obyek atau aktivitas yang memiliki karakteristik umum.

*Kelompok konsep*; sebagai contoh sumberdaya alam (natural-resources), yang meliputi antara lain air, tanah, udara, biofisikal dan beragam mineral.

*Tema-tema*; sebagai contoh, perkembangan masyarakat urban menuju ke arah budaya barat; perkembangan industri di negara-negara selatan. Tema mungkin berisikan konsep-konsep, mungkin juga mewujudkan suatu topik, atau isyu atau suatu kecenderungan. Tema-tema akan memperjelas tekanan dari suatu unit atau sub unit pengajaran. Tema-tema yang lebih luas misalnya, kajian tentang beberapa kawasan

urban yang cepat berkembang; wilayah-wilayah kebudayaan di dunia. Dari semua ini mesti dirancang fokus-fokus kejadiannya untuk setiap tingkatan.

*Fakta-fakta*; sebagai contoh, Bandung adalah ibukota Propinsi Jawa Barat; berupa informasi yang berisikan konsep-konsep yang hanya bisa diaplikasikan pada situasi yang spesifik. Hubungan di antara fakta-fakta mungkin saja membangun suatu generalisasi; misalnya, semua propinsi memiliki sebuah ibukota.

*Generalisasi*; sebagai contoh, manusia memanfaatkan berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Generalisasi tampak sebagai pernyataan-pernyataan dengan tingkat aplikasi yang lebih luas, yang berisikan dua atau lebih konsep dan menunjukkan adanya hubungan diantaranya. Generalisasi sering juga disebut sebagai ide pokok, pemahaman dasar, prinsip-prinsip, kaidah, aturan, atau kesimpulan-kesimpulan. Generalisasi deskriptif bertumpu pada pengertian generalisasi seperti tadi; sebagai contoh, setiap warga dari kelompok masyarakat itu memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesejahteraan hidupnya.

Kurikulum sering diorganisasikan dari sejumlah tema atau unit pengajaran, yang dirancang untuk setiap tingkatan. Topik-topik dan unit-unit pengajaran sering dikategorikan sebagai program pengajaran. Unit-unit pengajaran misalnya yang mengkaji tentang (1) keluarga, (2) sekolah, (3) masyarakat, (4) wilayah dan masyarakat urban; unit-unit semacam ini biasanya disajikan untuk tingkatan dasar. Sedangkan unit-unit pengajaran mengkaji, misalnya (1) sejarah dan geografi dari sejumlah negara, (2) pewarisan kebudayaan, (3) pemerintahan, bisa disajikan untuk tingkatan lanjutan (menengah)

*Tingkat pendidikan Dasar*

(1) Contoh tema-tema khusus:

Belajar bersama di sekolah

Mengenal lingkungan setempat (lokal)

Bagaimana bekerja dan bermain dengan sesama teman

Mengamati tetangga sekolah

(2) Contoh unit-unit dan topik-topik:

Belajar di sekolah

Aturan-aturan untuk bekerja dan bermain

Tentang diri sendiri

Keluarga kami

Membantu pekerjaan dalam keluarga

Para tetangga di sekitar keluarga kami

Para pekerja di lingkungan tetangga

Di mana keluarga berbelanja (barang)

Petugas pemadam kebakaran

Keselamatan dalam bekerja dan bermain

(3) Contoh Rincian untuk setiap tingkatan:

Tingkatan Pertama (1)

Keluarga, Sekolah dan Tetangga

Studi mengenai keluarga siswa sendiri, lingkungan sekolah dan para tetangga; misalnya dengan cara membandingkan di antara sesama siswa. Hal ini mesti ditekankan untuk menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang sama, dan respek-respek terhadap fakta-fakta adanya keanekaragaman (gejala dan proses).

Diriku dan orang lain

Keluargaku dan keluarga yang lain

Sekolah kami dan sekolah lain

Para pekerja di lingkungan tetangga

Pusat perbelanjaan  
Masyarakat petani dan pengrajin  
Mengapa kita membutuhkan aturan-aturan

### Tingkatan Kedua (2)

Kehidupan dalam kelompok-kelompok masyarakat

Ciri-ciri yang dimiliki oleh kehidupan di antara tetangga adalah suatu fokus kajian kehidupan masyarakat di tempat siswa tinggal pada saat itu; kemudian, dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Kajian ini sebagai pendahuluan untuk memahami ciri-ciri kehidupan dan kebutuhan dasar yang mesti ada bagi setiap orang.

Para pekerja di lingkungan masyarakat  
Pengadaan akan kebutuhan bahan makanan, tempat tinggal dan pakaian  
Masyarakat urban dan pedesaan  
Produsen barang-barang dan pelayanan  
Transportasi dan komunikasi  
Lapangan pekerjaan  
Kebebasan dalam masyarakat

### Tingkatan ketiga (3)

Kehidupan kota  
Kota-kota besar dan kecil  
Kota-kota di dunia

Hakekat kehidupan urban dan perluasan konsep masyarakat yang tergolong daerah-daerah perkotaan dan metropolitan diperoleh lewat kajian komparatif dari pusat-pusat urban yang dipikirkan.

Apa itu kota  
Pelayanan-pelayanan yang tersedia di kota  
Komunikasi dan transportasi di kota  
Bagaimana kota-kota mengalami perubahan  
Tentang pekerjaan atau karier dalam masyarakat urban  
Bagaimana kota kami tumbuh dari kota kecil menjadi kota besar seperti sekarang ini  
Bagaimana kota kami diperintah  
Aturan-aturan di kota mempengaruhi sikap kami  
Perencanaan dan renovasi daerah urban  
Kota-kota pada waktu yang akan datang

#### Tingkatan keempat (4)

Kehidupan di negeri kami  
 Keragaman wilayah negeri kami  
 Keragaman wilayah di permukaan bumi kita

Sejumlah program termasuk kajian tentang daerah-daerah di sekitar daerah tempat tinggal siswa, kemudian diperluas ke wilayah-wilayah geografis dari wilayah negara.

Sejarah negeri kami  
 Negeri kami dewasa ini  
 Bagaimana negeri kami diperintah  
 Peranan petugas-petugas negara  
 Komunikasi dan transportasi  
 Konservasi sumber daya alam dan energi  
 Aturan-aturan negara mempengaruhi sikap kami  
 Daerah-daerah dan ciri-ciri klimatologis wilayah negara kami  
 Ciri-ciri kehidupan di setiap wilayah negara kami kami

#### Tingkatan Kelima (5)

Kehidupan di negara-negara lain  
 Kehidupan di masa lampau dan modern

Tema umum adalah perkembangan negara-negara lain di masa lampau, dan aspek-aspek geografis dari negara-negara di berbagai belahan bumi.

Eksplorasi dan kolonisasi  
 Eksplorasi wilayah-wilayah di berbagai belahan bumi  
 Hubungan antar negara di dunia

#### Tingkatan keenam (6)

Bangsa-bangsa dan keanekaragaman kebudayaannya  
 program berikut ini meliputi kajian geografis secara regional dan global, terutama wilayah-wilayah dan kehidupan bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi.  
 Latar belakang sejarah benua-benua  
 Berbagai kelompok bangsa dan kebudayaannya  
 Eksplorasi dan kolonisasi

#### Tingkatan ketujuh (7)

Negara, bangsa dan kebudayaan di Asia dan Afrika  
 Migrasi kelompok-kelompok bangsa



Kajian dalam program berikut ini memberikan tekanan pada wilayah, bangsa, dan kebudayaan di Asia dan di Afrika (khususnya Afrika Utara); yang banyak hubungannya dan pengaruhnya terhadap negara dan bangsa sendiri.

Pusat-pusat peradaban masa lampau  
Bangsa dan kebudayaan di Timur Tengah dan Afrika Utara  
Asia sentral dan Timur jauh Kolonialisasi di Asia

Tingkatan kedelapan (8)

Latar belakang sejarah negara dan bangsa kami  
Wilayah negara kami  
Masyarakat dan kebudayaan bangsa kami

Kajian program berikut ini untuk mengenal, memahami dan menghayati serta berpartisipasi dalam upaya-upaya membangun masyarakat dan bangsa sendiri.

Sejarah masa lampau wilayah negara kami  
Masa kolonialisasi dan eksploitasi  
Perjuangan kemerdekaan bangsa/negara kami  
Ciri-ciri masyarakat dan kebudayaan bangsa kami  
Lembaga-lembaga pemerintahan negara  
Pembangunan dan modernisasi

Tingkatan Kesembilan (9)

Program berdasarkan kebutuhan dan bersifat elektif

Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa yang akan melanjutkan belajar ke jenjang selanjutnya; atau, bagi siswa yang terpaksa putus sekolah (tidak dapat melanjutkan studinya). Di sinilah letak elektif yang dimaksud tadi, yakni pilihan-pilihan yang tepat dan dibutuhkan oleh kedua kelompok siswa tersebut.

Contoh topik-topik yang dipilihkan:

Pengantar ilmu-ilmu sosial  
Ketenagakerjaan di Indonesia  
Sumber daya alam dan manusia di pedesaan

## **2. Kegiatan Belajar Di Pesantren Dalam Visi IPS**

Kegiatan pengkajian ajaran agama Islam di pesantren, baik yang berkenaan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah terutama bersumber dari kitab-kitab kuning dengan menggunakan berbagai metode, misalnya balagan, sorogan dan weton. Tentu

saja setiap metode ini memiliki sumbangan bagi pengembangan iman, ilmu, keterampilan dan proses berpikir untuk para santrinya. Hal ini akan dibahas secara lebih rinci pada bagian selanjutnya.

Kehidupan berasrama (pondokan) bagi para santri tidak terlepas juga dari proses pengembangan berbagai nilai, sikap dan pola-pola tindakan. Sebagai contoh, kedisiplinan dan kemampuan untuk menghargai nilai waktu, kerja, kebersamaan, adaptasi, integrasi, interaksi, partisipasi, keharmonisan, imitasi dan toleransi baik yang berkenaan dengan kegiatan belajar, beribadat, dan berbagai bentuk kegiatan keseharian sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Kehidupan berasrama model pondok pesantren boleh dikatakan sebagai *miniatur* dari kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Berbagai kegiatan organisasi kepemudaan misalnya kepramukaan, kepalangmerahan, ketarunakaryaan, olah raga dan berbagai bentuk kesenian, bagi para santri di pesantren Kiangroke bukan sesuatu yang asing. Bahkan untuk mengembangkan keterampilan bidang elektornika dan seni budaya (daerah), tidak jarang para pemuda dari kalangan masyarakat setempat secara suka rela ikut melatih keterampilan tersebut bagi santri di lingkungan pondok pesantren Kiangroke.

Dalam kegiatan majelis taklim atau pengajian rutin bagi masyarakat setempat, yang diselenggarakan oleh pimpinan pesantren, yang dikenal dengan mingguan atau bulanan, para santri banyak dilibatkan untuk menyiapkan tempat dan sarana yang diperlukan lainnya. Khusus bagi santri senior telah terbiasa memberikan dakwah manakala ajengan berhalangan. Mereka sejak berada di pesantren telah dibiasakan menghadapi massa; beradaptasi serta berintegrasi dengan khalayak yang lebih luas. Dalam kegiatan semacam ini bagi santri tengah mengalami proses belajar dalam bentuk *magang*.

Nilai dan sikap fanatisme dari para santri keluaran pesantren Kiangroke, ditujukan kepada pondok pesantren dan pribadi ajengan di mana dulu mereka belajar, diaktualisasikan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam forum silaturahmi. pada dasarnya peristiwa ini bagi mereka merupakan penerapan konsep *saya terus belajar* (ancoraimparo), karena dalam kesempatan ini mereka membawa sejumlah permasalahan atau temuan-temuan yang berkembang dalam masyarakatnya. Permasalahan tersebut mereka bawa untuk *dimutolaah* bersama ajengan dan para pimpinan pesantren lainnya. Fatwa atau pandangan sebagai hasil mutolaah tersebut bagi para santri keluaran pesantren merupakan wawasan (baru) yang akan menambah *ambahan* yang telah dimiliki sebelumnya, dan merupakan bekal (baru) dalam melakukan syiar agama bagi masyarakatnya.

Pondok pesantren Kiangroke telah banyak didatangi para santri keluaran pesantren tersebut yang masih ragu untuk memberikan fatwa atau pandangan terhadap masyarakatnya berkenaan dengan beberapa permasalahan. Misalnya, masalah tenaga kerja wanita beserta sejumlah eksesnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kecenderungan ekses-ekses (negatif) misalnya bisa menimbulkan antara lain dari giliran kerja malam hari; kemudian, tenaga kerja wanita (ke luar negeri), yang meninggalkan suami dan anak-anaknya dalam jangka waktu yang relatif lama. Masalah lainnya, tentang kecenderungan semakin bebasnya pergaulan para remaja dengan berbagai bentuk *tingkah paripolah* yang mengarah pada hal-hal batil. Ada juga yang masih mempermasalahkan sistem perbankan, di mana masyarakat telah banyak terlibat di dalamnya, baik sebagai penyimpan maupun sebagai peminjam uang untuk kebutuhan modal usahanya. Kemudian tidak terlewatkan juga perilaku-perilaku yang bersifat *khalafiah*, kekinian, misalnya semakin maraknya berbagai bentuk industri hiburan di kalangan masyarakat baik diperkotaan maupun di masyarakat pedesaan.

Fenomena inipun tidak jarang menyertakan ekses-ekses yang cenderung menggoyahkan sendi-sendi aqidah. Semua permasalahan tadi dijadikan bahan oleh para santri keluaran pesantren untuk didiskusikan atau dimutolaaah bersama-sama ajengannya, tentu saja dengan acuan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Beberapa metode pengkajian ajaran agama Islam, terutama yang digali dari kitab-kitab kuning, tentu saja telah memberikan andil dalam mengembangkan iman, ilmu, keterampilan, dan proses berpikir bagi para santrinya. Misalnya, dalam skenario metode *balagan* para santri dengan penuh perhatian dan disiplin berusaha untuk menyimak atau membacakan kembali bahan kajian yang telah terlebih dulu dibacakan oleh ajengan. Dalam metode ini pula para santri diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya baik yang *mantuh* (apa yang tersurat) maupun yang *mafuh* (apa yang tersirat) dari bahan kajian tersebut. Dari apa yang tersurat dan tersirat muncul apa yang disebut *bahthul masail*, yaitu suatu kegiatan pembahasan (masalah) baik hubungan antar konsep tertentu dengan anasir-anasir aktual. Misalnya saja, jika ajengan (ulama) adalah *warosatul ambia*, pewaris nabi, maka untuk meneruskan ajaran-ajaran atau contoh-contoh yang dilakukan nabi yang bersifat *salafiah*, yang dulu ada dan dilakukan oleh nabi, boleh dikatakan tidak banyak masalah bagi ulama untuk mensyiarkannya kembali. Namun, bagi fenomena yang ada sekarang, yang bersifat *Khalafiah*, kekinian; artinya, belum ada dan berkembang pada zamannya nabi, maka timbul masalah bagaimana seorang ajengan (ulama) mengadaptasikannya dengan nilai-nilai salafiah, dan bagaimana mendialogkannya kepada masyarakat. Tentu saja hal ini memerlukan kematangan *kauliah* dari ajengan itu sendiri, yaitu baik segi ilmu atau teori maupun segi keteladanan atau aplikasi. Hal ini sesuai dengan mutu yang dituntut dari seorang ajengan, yang antara lain (1) ilmu; (2) amaliah; (3) warosatul ambia atau pewaris nabi; kemudian lima pedoman yang mesti dipegang oleh seorang

ajengan, yaitu (1) memelihara dan mengembangkan akal yang sehat; (2) hiptuddin, mematuhi serta menjalankan syariah agama dengan baik; (3) hiptunasli, memelihara keturunan; (4) hipdulmal, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan; dan (5) hiptunapsi, memelihara diri (jiwa) sekalipun dari gangguan khurapat-khurapat, yaitu hal-hal yang menyimpang tetapi tak tergolong musrik (KHD.Zaim Djumhur, 1994).

Kegiatan belajar santri melalui metode *balagan* tadi, tampak upaya mengembangkan proses berpikir (*thinking process*) dengan diberikannya kesempatan untuk bertanya dan mendialogkan konsep yang dipelajari dengan anasir-anasir aktual. Aspek pengetahuan (*knowledge*) dikembangkan melalui usaha menyimak apa yang dibacakan oleh ajengan dengan penuh perhatian dan disiplin, sehingga baik yang bersifat *mantuh* (tersurat) maupun *mafuh* (tersirat) dapat dipahami, lebih-lebih melalui kegiatan *bahthul masail*, atau kegiatan membahas permasalahan. Sebagai contoh untuk mengembangkan pengetahuan dan proses berpikir para santri adalah sebagai berikut.

Beberapa konsep atau prinsip misalnya, (1) selalu mengajak orang untuk berpegang pada kebenaran agama; (2) di antara sesama dianjurkan saling melakukan *mardhoh* saling memberikan nasihat; (3) dalam menyampaikan dan mengajak pada kebenaran agama (Islam) dianjurkan untuk melakukan *wajadirhim bil arson*, melakukan diskusi. Bila prinsip-prinsip tadi diadaptasikan dan didialogkan dengan kondisi kehidupan masyarakat kekinian, bagaimanakah kecenderungannya? Bagaimana pula jika dihadapkan pada sementara masyarakat pedesaan yang masih sarat dengan anasir-anasir kehidupan tradisional? Kiat-kiat apa yang mesti dimiliki oleh setiap pendakwah dalam melakukan transformasi nilai tersebut.

Dari pembahasan permasalahan tadi mesti berkembang sejumlah sikap, misalnya sikap yang selalu harus berpibek kepada kebenaran hakiki (agama), dan selalu mesti menghindari dari berbagai bentuk kebatilan, yakni hal-hal yang terlarang dan diharamkan oleh ajaran agama. Sedangkan nilai-nilai yang mesti berkembang antara lain, segala niat (apa yang ada di dalam hati), ucapan, dan perbuatan mesti



mengacu pada kebenaran nilai agama, baik nilai-nilai yang berkenaan dengan *hablumminallah*, maupun *hablumminanas*. Demikian juga pola tindakan, semua sistem amaliah mesti sesuai dengan ketentuan ajaran agama, sehingga segalanya tergolong ibadah dan amalan yang baik (sholeh).

*Ambahan*, atau ilmu yang telah dimiliki oleh seseorang (melalui proses belajar), menurut KH. D. Zaim Djumhur (1995), hanya bisa diperoleh secara mantap bila memperhatikan enam persyaratan yang mesti ditanamkan serta dikembangkan oleh para santri. Keenam persyaratan tadi adalah, (1) *zaka*, atau kecerdasan yang selalu harus diasah atau dikembangkan secara wajar atau sehat; (2) *wahirsin*, atau motivasi yang harus selalu diperkuat; (3) *wastibarin*, atau kesabaran atau keprihatinan dalam menghadapi berbagai bentuk hambatan atau kesulitan; (4) *wabulgathin*, atau bekal materi yang wajib diikhtirakan, bukan hanya seberapa besar ukurannya tetapi seberapa baik cara dan substansinya; (5) *ustadin*, atau petunjuk atau bimbingan yang harus dilakukan oleh guru; (6) *turizaman*, atau faktor waktu yang membuat tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan proses belajar.

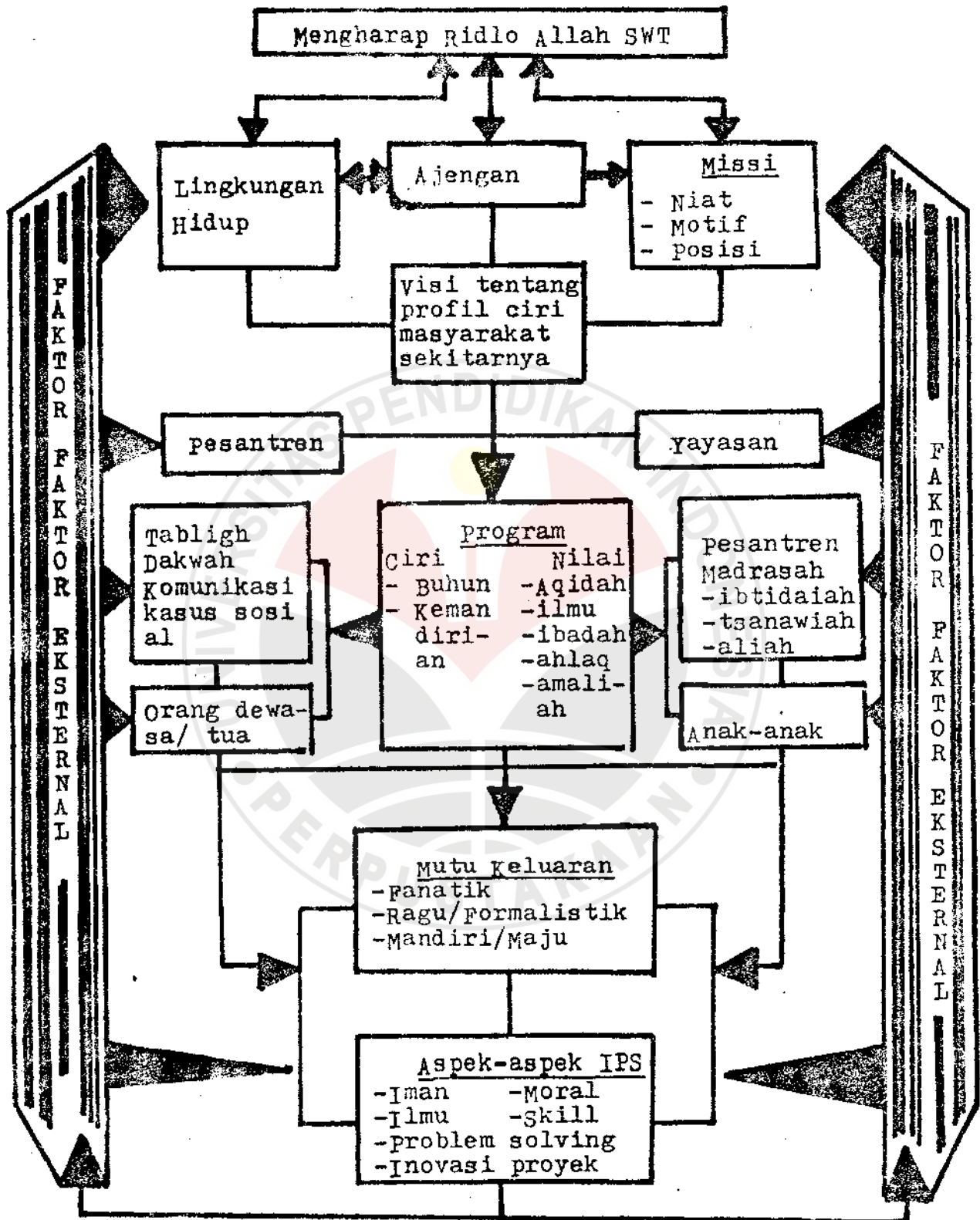
Keenam konsep tadi menunjukkan bahwa para santri tidak sekedar menerima ilmu yang disampaikan oleh ajengannya, tetapi juga mereka mesti mengenal serta memahami peluang-peluang yang membuat proses bisa berhasil secara optimal. Artinya, mereka mesti belajar bagaimana belajar, atau *learn how to learn*.

Kegiatan belajar di pesantren melalui metode sorogan misalnya, memberikan peluang untuk berkembangnya keterampilan membaca dan memperkaya pembendaharaan kata; karena, setelah ajengan membaca bahan kajian dan memberikan arti atau makna serta fungsinya pada setiap kata, santri mesti mengulangnya membaca dan mengartikan setiap kata yang terdapat pada bahan kajian tersebut. Dengan demikian, ketrampilan berbahasa juga dapat dikembangkan, yang selanjutnya akan

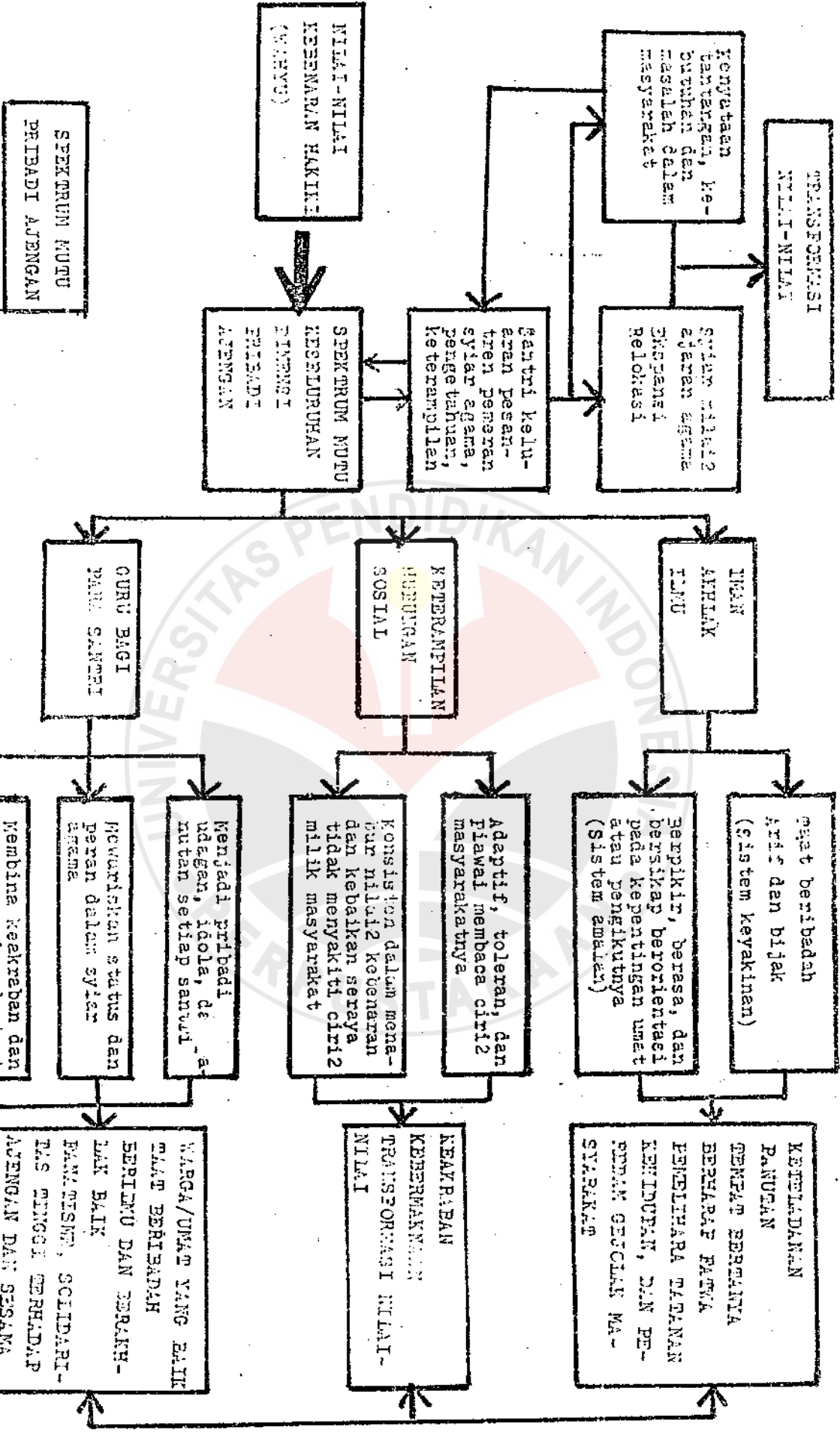
terampil juga mencari berbagai konsep, kaidah, dan prinsip-prinsip lain dari sumber-sumber bacaan yang relevan.

Nilai-nilai dan sikap-sikap yang berpeluang berkembang dan dituntut oleh metode sorogan ini, menurut H. Chaetibul Umam (1991), antara lain kesabaran, kerajinan, ketaatan atau disiplin yang mesti dikembangkan oleh para santri.

Nilai dan sikap fanatisme dari santri terhadap pribadi ajengan didasarkan pada mutu ilmu, amaliah dan status pewaris nabi (*warosatul ambia*). Ajengan sebagai fokus keteladanan bagi santrinya dan masyarakat di sekitarnya, menjadikan ia sebagai *miniatur* masyarakat (KH. D. Zaim Djumhur, 1994). Selanjutnya KH. D. Zaim Djumhur mengatakan bahwa ajengan sebagai pimpinan pesantren, sikapnya terhadap masyarakat selalu berusaha mengadaptasi sikap Rosulullah SAW, yang senantiasa untuk tahu ihwal kondisi yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, mungkin hampir setiap ajengan pada awal melakukan syiar agama, hampir selalu menghadapi kondisi masyarakat yang sangat awam untuk berdiskusi dan bermutolaah mengenai ajaran-ajaran agama Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang selalu digunakan adalah dengan upaya menyajikan bahan-bahan hafalan bagi masyarakatnya, misalnya dalam berbagai bentuk *nadhoman*. Setelah hafal betul, barulah melangkah pada upaya memahami maknanya, baik kata demi kata maupun makna dari keseluruhan syair *nadhoman* tersebut. Isi dari syair *nadhoman* itu beraneka ragam, misalnya yang berisikan sifat-sifat dari Allah SWT; sifat-sifat dari Rosulullah SAW; tarikh nabi; silsilah keluarga nabi, puji-pujian terhadap nabi, urutan rukun Islam dan rukun iman; urutan nama-nama nabi dan malaekat beserta tugasnya; urutan bacaan sholat; dan banyak lagi, yang semuanya erat hubungannya atau sebagai tahap awal dalam upaya memperkenalkan ajaran-ajaran agama Islam.



Bagan 2 : sistem kelembagaan di lingkungan pondok pesantren Kiangroke banjaran Bandung



Bagian 3 : Spektrum Sikap Perseorangan

Kearifan ajengan yang berkenaan dengan upaya membimbing masyarakatnya, misalnya ditunjukkan oleh kreativitasnya dalam menyusun doa-doa yang dipetik dari kandungan Al-Quran. Doa-doa tersebut disusun sedemikian rupa agar mudah dihafal dan diingat oleh masyarakatnya; misalnya urutan doa yang ditujukan dan diawali dari nabi, kemudian para keluarganya, para sahabatnya, para wali, dan seterusnya. Urutan doa-doa yang diawali dengan permohonan ampunan, kesehatan lahir batin, ilmu yang bermanfaat dan petunjuk ke jalan yang diridhoi-Nya, anak yang sholeh, rizki yang halal, diselamatkan dari api neraka, dan seterusnya. Selain itu, ajengan telah kreatif juga dalam menyusun doa-doa yang banyak dibacakan sesuai dengan setiap ragam peristiwa yang dialami manusia dalam berbagai sisi kehidupannya. Misalnya peristiwa kelahiran, perkawinan, kematian, kemalangan atau kena musibah, memperoleh keberuntungan, saat bepergian, saat awal melakukan suatu pekerjaan, dan seterusnya. Dalam hal ini, KH. D. Zaim Djumhur (1995) salah seorang pimpinan pondok pesantren Kiangroke, yang pernah relatif lama bermukim di Madinah, menyatakan bahwa kreativitas ajengan semacam tadi, tidak dijumpai di Tanah Arab.

Keterampilan kerjapun tidak terlepas dari perhatian pesantren, baik secara berstruktur maupun tidak, para santri diberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan kerja. Rupa-rupanya, sejak awal pimpinan pesantren telah menerawang latar belakang masyarakat dari mana sebagian besar santrinya itu berasal; terutama latar belakang sistem ekonomi atau lapangan usaha dari keluarga atau masyarakatnya. Dengan mengetahui latar belakang lapangan usaha keluarga ini, sekaligus ajengan *mafhum* akan kemampuan bekal materi dari para santrinya. Ajengan mafhum juga bahwa selepas dari pondok pesantren, kelak santrinya itu kembali ke lingkungan keluarga atau masyarakatnya masing-masing. Karenanya, untuk kelangsungan hidup mereka dan syiar agama, selain mereka mesti berbekal iman,



ilmu, dan moral, mereka mesti juga memiliki bekal keterampilan kerja untuk memberikam kebermaknaan dan kemanfaatan pada potensi-potensi (ekonomis) yang tersedia di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Bagaimanapun, santri keluaran pesantren, kelak akan menjadi pemuka agama atau ajengan di lingkungan masyarakatnya, yang selain mesti memiliki mutu ilmu, amaliah, dan status pewaris nabi (warosatul ambia) seyogianya juga memiliki apa yang disebut *wabul gathin*, atau bekal materi (KH.D. Zaim Djumhur, 1995).

Pertimbangan-pertimbangan seperti tadi, rupa-rupanya telah mentradisikan pondok pesantren untuk memberikan kesempatan kepada santrinya agar mengembangkan berbagai keterampilan khusus. Selain keterampilan kerja yang menjadi ciri atau kekhasan keluarga atau masyarakatnya (umumnya pedesaan), misalnya bidang agraris, kerajinan, pertukangan, dan bidang-bidang kerja informal lainnya, para santripun diperkenalkan pada keeterampilan yang bersifat kekinian seperti bidang elektronika dan penerapan teknologi tepat guna bagi bidang agraris, misalnya, yang telah berhasil di pesantren Kiangroke, pemeliharaan ikan air tawar sistem arus deras.

Bekal keterampilan kerja khusus itu, selain sebagai salah satu sarana untuk beradaptasi, berintegrasi, memelihara dan mengembangkan pola-pola yang ada di lingkungan keluarga serta masyarakatnya, dimaksudkan pula untuk mendorong santri ke arah kehidupan yang mandiri selama mereka di pondok pesantren. Misalnya, para santri di pondok pesantren Kiangroke, telah lumrah secara bersama-sama atau bergiliran mengerjakan lahan-lahan milik pimpinan pesantren, atau lahan-lahan yang diwakafkan kepada pesantren. kemudian, dari hasil pemeliharaan ikan air tawar sistem arus deras, mereka dapat memenuhi sebagian kebutuhan kesehariannya. Di kalangan santripun telah terbiasa saling mencukuri rambutnya, atau bagi yang telah terampil menjahit, mereka memantu menjahitkan pakaian temannya. Dan masih banyak

kegiatan-kegiatan produktif lainnya yang merupakan embrio bagi pembinaan para santri agar kelak mampu membangun kehidupan yang mandiri, percaya akan kekuatan sendiri tanpa meremehkan kemungkinan bantuan dari pihak lain. Mentalitas seperti ini merupakan salah satu ciri dari umat yang maju (Kluckhohn, Koentjaraningrat, 1986).

Dari uraian tadi tampak bahwa pondok pesantren telah berupaya untuk berperan dalam proses pewaisan dan transformasi nilai; yang esensinya adalah memperkenalkan kemanfaatan iman, ilmu, moral, sikap dan pola-pola tindakan serta sejumlah keterampilan khusus. Kemanfaatan yang dimaksudkan tadi adalah, dilihat dari segi proses dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan syiar agama Islam dan kelangsungan pola-pola kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Di sisi lain, dilihat dari segi produk, dimaksudkan untuk menjamin kehidupan yang sejahtera yang penuh rahmat serta magfiroh Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Keseluruhan kegiatan belajar di pondok pesantren serta nilai-nilai yang berkembang dari kegiatan tersebut, bila saja disimpulkan berdasarkan visi IPS adalah sebagai berikut. *Pertama*, nilai iman, ilmu, moral, keterampilan, proses berpikir (problem solving, inovasi proyek) yang berkembang dari berbagai kegiatan belajar di pondok pesantren, menurut visi pengajaran IPS, pada hakekatnya pengintegrasian metode dan konsep (konten) yang diadaptasi atau diangkat dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora (agama, filsafat, seni) serta ilmu-ilmu lainnya. Sebagai bahan bandingan, visi studi sosial (IPS), ala Robert Barr, James L. Barth, dan S. Samuel Shermis (1968), tentang nilai yang bersifat universal atau yang luhur, misalnya berkenaan dengan derajat manusia, dikatakannya bahwa *all men are created equal*. Di pondok pesantren dikembangkan juga nilai (keyakinan), yang selain keyakinan bahwa *semua manusia diciptakan sama*, bahkan diyakini pula bahwa *semua manusia di hadapan*

*Tuhan (Allah SWT) adalah sama (derajatnya); kecuali hanya yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya yang membedakan di antara manusia itu.*

Karena pengajaran IPS di sekolah-sekolah merupakan bagian dari keseluruhan upaya pendidikan, dan salah satu tujuan pendidikan adalah mengembangkan nilai keimana dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka IPS pun berkontribusi dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dikembangkan oleh berbagai kegiatan belajar di pondok pesantren (khususnya di Kiangroke), yaitu nilai iman, ilmu, moral, keterampilan dan proses berpikir (problem solving, inovasi proyek), relevan dengan aspek-aspek yang dikembangkan oleh IPS (studi sosial) antara lain, pengetahuan (knowledge), yang selain memuat elemen-elemen pengetahuan yang dihasilkan oleh ciptaan atau rekayasa manusia, juga termasuk di dalamnya pengetahuan atau ilmu yang berkenaan dengan ajaran agama (aqidah dan muamalah); kemudian proses berpikir (thinking process); aspek keterampilan (skills); aspek nilai (moral), sikap-sikap dan pola-pola tindakan. *Kedua*, nilai-nilai yang berkembang dari berbagai kegiatan belajar di pondok pesantren seperti yang telah disebutkan pada butir pertama tadi, memberikan peluang kepada para santri keluaran pesantren untuk mampu dan terampil dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya. Fungsi-fungsi sosial yang dimaksud antara lain kemampuan adaptasi, integrasi, penanganan gejolak (konflik) di lingkungan masyarakatnya, pemeliharaan pola-pola kelembagaan, dan pencapaian tujuan bersama. *Ketiga*, meskipun pengajaran IPS di pondok pesantren tidak tampak berstruktur sebagaimana yang disajikan oleh sistem madrasah atau persekolahan, namun semua kegiatan belajar di pondok pesantren itu merefleksikan hakekat, pendekatan, konten, dan tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh pengajaran IPS.